

## MEMBANTU NAGARI MEMBANGUN MELALUI PELATIHAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DI NAGARI

Desna Aromatica<sup>1</sup>, Wewen Kusumi Rahayu<sup>2</sup>, Diego<sup>3</sup>, Yoserizal<sup>4</sup>, Firmanto<sup>5</sup>, Arya Azra  
Leswara<sup>6</sup>, Naufal Azmi “Chan”<sup>7</sup>, Dhea Yosfika<sup>8</sup>

<sup>1,2,4,6,7,8</sup>)Program Studi Administrasi Publik, Fakultas ISIP, Universitas Andalas

<sup>3</sup>)Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas ISIP, Universitas Andalas

<sup>5</sup>)Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Propinsi Sumatera Barat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat  
*e-mail:* <sup>1</sup>)desnaaromatica@gmail.com, <sup>2</sup>)wewenkusumi@soc.unand.ac.id, <sup>3</sup>)Diego@soc.unand.ac.id,

<sup>4</sup>)Yoserizal@soc.uand.ac.id, <sup>5</sup>)sipfirmanto@yahoo.com, <sup>6</sup>)azraarya30@gmail.com<sup>7</sup>

<sup>8</sup>)Naufallazmiichan@gmail.com, <sup>8</sup>)dheayoestika@gmail.com

### Abstrak

Membantu Nagari Membangun adalah program berkelanjutan yang dilaksanakan di nagari-nagari di wilayah Sumatera Barat yang digagas oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Andalas. Program ini bertujuan memberikan pendampingan pada pemerintah nagari dalam melakukan pembangunan salah satunya adalah melakukan pelatihan pembuatan produk hukum di Nagari. Keberhasilan pembangunan tidak terlepas dari adanya ketersediaan produk hukum yang baik sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pelatihan yang dilaksanakan oleh tim pengabdian berkolaborasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan ini dilaksanakan di Nagari Labuah Panjang Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok. Pemerintah Nagari dalam hal ini Wali nagari dan jajarannya bersama Badan Permusyawaratan Nagari sebelumnya telah membuat dan menyepakati beberapa produk hukum nagari seperti Peraturan nagari dan Peraturan Wali Nagari. Produk hukum yang telah dihasilkan dari segi jumlah dan kualitas perlu ditingkatkan sehingga dilaksankanlah pelatihan penyusunan produk hukum di Nagari. Pelatihan ini dilaksanakan dengan berbagai metode mulai dari ceramah/sosialisasi kemudian bermain game dan tugas kelompok. Melalui kegiatan ini Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan nagari termotivasi untuk melaksanakan revisi terhadap produk hukum yang telah ada namun belum memenuhi kaidah-kaidah suatu produk hukum.

**Kata kunci:** Pemerintah Nagari, Produk hukum, Pembangunan

### Abstract

Helping Nagari to build is a sustainable program implemented in nagari in west sumatera, which was initiated by the Andalas University research and community service institute. This program aims to provide assistance to the nagari government in carrying out development, one of which is conducting training in the manufacture of legal products in the nagari. The success of this development cannot be separated from the availability of good legal products as guidelines in carrying out development. This activity is carried out in the form of training carried out by a service team in collaboration with the village/nagari community empowerment office in the province of west sumatera. This activity was carried out in Nagari Labuah Panjang, District X Koto Diatas Solok regency. The nagari government, in this case the nagari guardian and his staff together with the nagari consultative body, have previously made and agreed on several nagari legal products such as the nagari regulation and the nagari guardian regulation. Legal products that have been produced in terms of quantity and quality need to be improved so that training in the preparation of legal products is carried out in the nagari. This training is carried out using various methods ranging from lectures/socialization then playing games and group assignments. This activity was in great demand by the training participants to carry out revisions to existing legal products but do not meet the rules of a legal product.

**Key words:** Nagari Government, Product Of Law, Development

## PENDAHULUAN

Nagari adalah unit pemerintahan terdepan di Sumatera Barat. Perubahan pemerintahan dari desa menjadi nagari terjadi di tahun 2001 setelah lahirnya peraturan daerah nomor 9 tahun 2000 tentang pokok-pokok pemerintahan nagari. Pada tahun 2014 dengan lahirnya undang-undang nomor 6 tahun 2014 pemerintahan nagari semakin jelas kedudukan dan kewenangannya, dan tidak lagi menjadi objek pembangunan namun menjadi subjek pembangunan. Pemerintah nagari menjadi entitas penting dalam pembangunan masyarakat di level terdepan. Melaksanakan pembangunan untuk kesejahteraan dan kemandirian masyarakat menyebabkan Pemerintah nagari perlu membuat berbagai produk hukum sebagai dasar aturan dalam jalannya pembangunan untuk masyarakat. Produk hukum dalam pemerintahan nagari menjadi jaminan bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat nagari. Maka ada beberapa macam produk hukum nagari yang dijelaskan dan teknis serta filosofis pembuatannya.

## METODE

Metode dan tahap pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat menerapkan pendampingan dengan melakukan pelatihan pembuatan produk hukum dengan peserta pelatihan terdiri dari pemerintah nagari dan Badan Permusyawaratan nagari ( BPN ). Kegiatan ini terdiri dari beberapa tahapan. Penyampaian materi tentang produk hukum nagari, kemudian dilanjutkan dengan permainan gameadu cepat dan penugasan kelompok. Peserta diakhir kegiatan diminta untuk mengoreksi draft produk hukum yang tidak sesuai kaidah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Peserta pelatihan produk hukum nagari terdiri dari pemerintah nagari dan BPN. Pemerintah nagari terdiri dari wali nagari, sekretaris nagari yang membawahi bendahara, dan 2 orang staff nagari. Selanjutnya terdapat 3 kasi yaitu kasi pemerintahan, kasi pembangunan, dan kasi kesra. Ada 3 kepala jorong yaitu Jorong Guguak Baru, Jorong Pandan Tinggi, dan Jorong Batu Tinggi. Badan Musyawarah Nagari terdiri dari Ketua BMN, Wakil Ketua, Sekretaris, Ketua Komisi A dengan 1 Anggota, Ketua Komisi B dengan 1 anggota, dan Ketua Komisi C dengan 1 anggota.

Tahap 1 adalah penyampaian materi produk hukum nagari. Produk hukum nagari terdiri dari Peraturan nagari, Peraturan bersama wali nagari dan peraturan wali nagari. Materi tahap 1 menjelaskan tentang asas, teknik dan proses penyusunan peraturan di Nagari. Asas pembentukan produk nagari yaitu peraturan nagari terdiri dari beberapa asas. Kejelasan tujuan, kelembagaan/organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan. Peserta juga dijelaskan tentang apa saja yang menjadi dasar dalam pembuatan peraturan nagari. Ada 3 landasan yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis. Semua produk hukum memuat ketiga landasan tersebut. Berikut adalah Tahap Perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan dan penyebarluasan Peraturan Desa. Landasan filosofis adalah landasan yang berkaitan dengan dasar atau ideologi negara., yaitu nilai-nilai (cita hukum) yang terkandung dalam Pancasila. Landasan sosiologis adalah landasan yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan empiris yang hidup dalam masyarakat, sehingga mempunyai daya mengikat secara efektif. Landasan Yuridis adalah yang menjadi dasar kewenangan pembuatan peraturan perundang-undangan. Adapun kerangka peraturan desa terdiri dari , Penamaan/Judul, Pembukaan, batang tubuh, penutup, lampiran (jika diperlukan). Pada tahap 1 juga disampaikan materi tentang tugas BPD yang terkait dengan penyusunan produk hukum di Nagari. Berikut adalah fungsi BPD

- a. Menggali, menampung, mengelola, menyalurkan aspirasi masyarakat
- b. Menyelenggarakan Musyawarah Badan Perwakilan Nagari
- c. Menyelenggarakan Musyawarah Nagari
- d. Menyelenggarakan Musyawarah Desa Khusus pemilihan wali nagari antar waktu
- e. Membentuk panitia Pemilihan Wali Nagari
- f. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Nagari & lembaga Nagari lainnya
- g. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Nagari
- h. Membahas pengelolaan kekayaan Nagari
- i. Pengawasan kinerja Wali Nagari
- j. Menerima keluhan masyarakat tentang pelaksanaan pembangunan nagari

- k. Mengevaluasi LKPPD
- l. Melaksanakan tugas lain.

Badan Perwakilan Nagari dan Wali Nagari membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Nagari yang diajukan BPN dan atau Wali Nagari. Pembahasan Rancangan Peraturan Nagari diselenggarakan oleh BPN dalam musyawarah BPN paling lambat 10 hari kerja terhitung sejak rancangan Peraturan Nagari diterima oleh BPN. Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Nagari antara BPN dan Wali Nagari untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BPN. Setiap pembahasan rancangan Peraturan Nagari dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah. Dalam hal pembahasan Rancangan Peraturan Nagari antara BPN dan Wali Nagari tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati. Rancangan Peraturan Nagari dapat diajukan oleh Wali Nagari kepada Bupati/Wali kota melalui Camat disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan. Tindaklanjut evaluasi dan pembinaan dapat berbentuk penghentian pembahasan atau pembinaan untuk tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan rancangan Peraturan Desa Tindak lanjut pembahasan dan kesepakatan dapat dihadiri Camat atau pejabat lain yang ditunjuk Bupati/Wali kota.



Gambar 1

Tahap 2 adalah Permainan *game* dengan tujuan mengetahui sejauhmana peserta pelatihan memahami materi yang telah dijelaskan sebelumnya oleh narasumber. *Game* yang dilakukan adalah memberikan pertanyaan dan peserta harus menjawab dengan cepat berbagai pertanyaan. Tahap 3 adalah latihan. Peserta dibagi dalam kelompok kecil dan diberikan draft produk hukum nagari yaitu peraturan nagari, kemudian diminta untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam naskah tersebut. Kegiatan ini berlangsung selama 2 jam penuh dan peserta pelatihan melalui dengan antusias karena materi yang disampaikan sangat berkaitan erat dengan tugas mereka sebagai bagian dari pemerintahan nagari.

## SIMPULAN

Pengabdian masyarakat dengan judul Pelatihan Penyusunan Produk Hukum di Nagari dilakukan untuk membantu pemerintah nagari menyusun dan menyepakati peraturan hukum dinagari sebagai panduan dan pegangan bagi seluruh elemen yang ada di NAgari dalam melaksanakan kehidupan pemerintahan dan kemasyarakata. Melalui pelatihan ini diharapkan kapasitas dan kompetensi mereka sebagai penyusun produk hukum dapat dijalankan dengan sangat baik. Melalui pelatihan ini pemerintah nagari akan mengevaluasi kembali berbagai produk hukum yang telah mereka hasilkan dan yang akan mereka sepakati.

## SARAN

Hasil kegiatan ini diharapkan dapat menjadi pedoman Pemerintah Nagari dan BPN dalam menyepakati berbagai produk hukum nagari yang digagas. Minimnya pendampingan dan pelatihan dari pemda menjadi harapan baru bagi pemerintah nagari labuah panjang dengan kehadiran dan bantuan tim pengabdi untuk terus melakukan pengembangan organisasi sebagai garda terdepan masyarakatnya melalui pengabdian masyarakat berkelanjutan dari perguruan tinggi khususnya Universitas Andalas dalam menghasilkan produk hukum nagari yang berkualitas dan sesuai kaidah hukum.

**UCAPAN TERIMA KASIH**

Terimakasih Tim ucapkan kepada Pemerintah Nagari Labuah Panjang beserta tokoh masyarakat dan berbagai elemen masyarakat lainnya yang telah mengikuti kegiatan pengabdian ini. Terimakasih kepada LPPM Unand yang telah memberikan dukungan pendanaan dalam pengabdian ini sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan lancar, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari Propinsi Sumatera Barat. Terimakasih kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari Kabupaten Solok.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Aromatica, Desna. 2021. Pemerintahan Nagari dalam Perspektif Administrasi Publik:Sebuah Kajian tentang Kelembagaan. Banyumas: Amerta Media
- Gorfner, H. dkk. 1997. Organization Theory: a public perspective. USA : Harcourt Brace College
- Undang-Undang no 6 tahun 2014 Tentang Desa
- Winardi, J. 2015. Manajemen Perilaku Organisasi. Jakarta : Prenada Media Group